



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **FATHUL MUSHALLI, S.STP., M.Si**
Jabatan : **CAMAT SUNGAI RAYA**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H. SYAFRUDIN NOOR, S.E, S.Sos**
Jabatan : **BUPATI HULU SUNGAI SELATAN**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua
H. SYAFRUDIN NOOR, S.E, S.Sos


Pihak Pertama
FATHUL MUSHALLI, S.STP., M.Si
NIP. 198609092006021002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN SUNGAI RAYA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Persentase Kepuasan Pegawai Pada Pelayanan Internal Perangkat Daerah	100 %
2	Meningkatnya efektivitas penanganan pengaduan masyarakat untuk memastikan terselesaikannya setiap aduan secara tuntas.	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	100 %
3	Meningkatnya efektivitas dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.	Persentase Ketercapaian Kinerja Kecamatan	80 %
4	Meningkatnya mutu sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan publik	Persentase Sarana dan Prasarana Pelayanan dalam Kondisi Baik	100 %
5	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa/kelurahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.	Persentase Desa/Kelurahan yang Menyelesaikan Laporan Kinerja Tepat Waktu	100 %
6	Meningkatnya kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah pelayanan.	Persentase pelanggaran perda dan perbub yang ditangani	100 %
7	Meningkatnya kualitas fasilitasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	Persentase Fasiltasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan	100 %
8	Meningkatnya fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat secara terpadu dan berkelanjutan	Cakupan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %

PROGRAM	ANGGARAN
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 3.211.991.705,00
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp 284.875.720,00
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 101.354.004,00

7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp 101.823.592,00
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp 3.500.000,00



Pihak Kedua

H. SYAFRUDIN NOOR, S.E, S.Sos

Pihak Pertama

FATHUL MUSHALLI, S.STP., M.Si

NIP. 198609092006021002